

Nilai-nilai Pendidikan Sosial Profetik Islam Dalam Ideologi Pancasila

Muhammd Syukri Nawir¹ dan Athoillah Islamy²

Abstract, *The dichotomous and even confrontational paradigm of the relationship between Islamic teachings and Pancasila as a state ideology is still found in Indonesian Muslims. This should not need to happen, because in fact the teachings of Islam and Pancasila have a universal intersection of values for the plurality of social life. This study aims to identify the value of Islamic prophetic social education in the construction of Pancasila. Quality research in the form of literature studies uses a normative-philosophical approach. Secondary data in the form of relevant journals, books, theses and dissertations. The three values in the idea of Islamic Prophetic Social Sciences formulated by Kuntowijoyo in the form of the values of humanization, liberation and transcendence became the analytical theory of the discussion of this research. These three values will be used to identify various prophetic social education values contained in the Pancasila precepts. The nature of this research approach is descriptive-analytic. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and data verification. The results showed that there was a dimension to the values of prophetic social education contained in Pancasila. First, the educational value of transcendence in the precepts of the Almighty Godhead. The existence of the contained divine value can be a basis for values, paradigms and approaches in transforming the value of transcendence in all forms of educational activities. Second, the value of humanist education in the precepts of humanity and the precepts of unity. The existence of human values and unity can be a basin of values, paradigms and approaches to humanist educational activities that have an orientation of human empowerment of the urgency of science as well as positioning humans with all their potential. Third, the value of liberated education in the precepts of democracy and social justice. The existence of these values can be a basis for values, paradigms and approaches in liberation education that have an orientation to guide individuals so that they can be free from the intervention of any party or group that has a negative impact on social life. The theoretical implications of the findings of this study show that there is a meeting point for the content of universal values in Pancasila with the social teachings of Islamic religion. The limitations of this research can also be a lacuna (gap) for the next research, namely this research has not examined how the role of the government in disseminating the intersection of the social values of Islamic religion contained in the construction of Pancasila in the praxis life of Indonesian society.*

Keywords: Educational value, social prophetic, Islam, Pancasila

Pendahuluan

Dialektika pemikiran ke-Islaman dengan kenegaraan pada konteks negara demokrasi tidak selalu menampilkan wajah relasi harmonis.³ Sebagai contoh paradigma sebagian umat Islam di Indonesia yang memandang bahwa Pancasila sebagai ideologi negara tidak sejalan

¹ Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, email: syukrinawir204@gmail.com

² Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, email: athoillahislamy@yahoo.co.id

³ Eko Siswanto and Athoillah Islamy, "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 20.

dengan ajaran Islam.⁴ Bahkan yang disayangkan, paradigma tersebut tidak sekedar berhenti pada wilayah diskursus maupun wacana, melainkan menjelma dalam bentuk gerakan sosial-politik yang mengharapkan Pancasila diganti dengan ideologi Islam.⁵ Paradigma dikotomis atas relasi Pancasila dan Islam tersebut sungguh disayangkan. Mengingat pelbagai nilai universal yang termuat dalam Pancasila sejatinya memiliki titik temu dengan ajaran Islam. Selain itu, perlu disadari kembali bahwa Indonesia notabenenya bukanlah negara teokrasi, namun juga bukan negara sekular,⁶ sehingga niscaya jika, baik nomenklatur maupun simbol Pancasila tidak terkesan identik pada satu kelompok, golongan maupun agama tertentu

Untuk memahami titik temu nilai ajaran Islam dan Pancasila bukanlah hal mudah, melainkan dibutuhkan paradigma maupun pendekatan yang dapat membentuk paham dan sikap sosial keberagamaan maupun hukum Islam (*fiqh*) yang moderat dalam merespons nilai universal dalam Pancasila.⁷ Dengan kata lain untuk memahami relasi kontributif antara nilai-nilai ajaran Islam dengan Pancasila dibutuhkan moderasi paham dan sikap maupun hukum terkait sosial keberagamaan.⁸ Pada konteks inilah, penghayatan kembali terhadap pelbagai nilai universal yang termuat dalam konstruksi Pancasila menjadi sebuah keniscayaan.

Jika melihat latarbelakang masyarakat Indonesia sendiri sejatinya mempunyai basis pluralitas kehidupan sosial budaya sekaligus agama yang dapat sinergis dalam merealisasikan karakter keberagamaan umat Islam yang moderat, baik melalui internalisasi pada aktifitas di instansi pendidikan Islam formal, maupun non formal.⁹ Sebagaimana spirit ajaran Islam berupa *rahmatan lil alamin* (kasih sayang terhadap kehidupan alam semesta) menjadi bagian ajaran Islam universal yang melintasi ruang dan waktu. Universalisme tersebut menekankan ajaran-ajaran Islam universal, seperti nilai keadilan, kemaslahatan, dan fleksibilitas terhadap perkembangan zaman. Atas dasar inilah, maka melalui ajaran universal Islam dapat menjadi elemen penting pembentukan paham maupun sikap inklusif dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis pada konteks relasi kehidupan ke-Islaman, kebudayaan dan kenegaraan.¹⁰

Keberadaan ide Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang pernah dilontarkan oleh salah satu intelektual muslim Indonesia, yakni Kuntowijoyo setidaknya dapat menjadi pilihan strategis sebagai pendekatan maupun basis paradigmatis dalam memahami muatan nilai-nilai ajaran Islam dalam Pancasila.¹¹ Penting diketahui bahwa terdapat tiga nilai yang menjadi komponen dalam ide ISP berupa nilai humanisasi, liberasi dan transendensi diambil dari tiga nilai ajaran Islam berupa, *amar makruf, nahi munkar* dan iman.¹² Melalui tiga nilai ISP tersebutlah dalam

⁴Nur Syam and S. Maryam Yusuf, "Islam Dan Pancasila Dalam Pertarungan Ideologi Dunia: Perspektif Sosiologis," *Dialogia, Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 18 (2020): 100.

⁵ M. Saifullah Rohman, "Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila," *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2013, 207.

⁶ Imam Sutomo and Budihardjo Budihardjo, "The Rejection of Religious Nationalism Towards The Secular State And The Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (2021): 125.

⁷ Eko Siswanto and Athoillah Islamy, "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 200–201.

⁸ Amirullah Amirullah, Athoillah Islamy, and Hamzah Hamzah, "Moderasi Fikih Muamalah Di Indonesia: Analisis Terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Al-Bayyinah* 6, no. 1 (2022): 97.

⁹ Nunung Hidayati, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy, "Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia," *Transformasi* 3, no. 2 (2021): 1.

¹⁰ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 61.

¹¹ Maskur Maskur, "Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah Atas Relasi Humanisasi, Liberasi Dan Transendensi)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 127.

¹² Khusni Arum, "Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo)," *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2018, 181.

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendekatan dalam mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan sosial profetik yang termuat dalam Pancasila.

Berpijak pada latarbelakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai pendidikan sosial profetik dalam konstruksi Pancasila. Meski demikian, penulis menyadari penelitian tentang relevansi Pancasila dengan ajaran Islam oleh pelbagai penelitian sebelumnya. Namun di sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan erat dengan fokus pembahasan inti dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut. Penelitian Ihsan dan Ahmad Fatah (2011) menyimpulkan bahwa Pancasila memuat objektifikasi nilai ketauhidan dan nilai religius.¹³ Berikutnya, penelitian Martha Catherine Beck dan Irawan (2014) menyatakan bahwa pancasila dan rukun Islam memiliki relevansi dengan sistem pendidikan di Indonesia dalam hal pembentukan nilai kemanusiaan, spiritual, demokrasi, multikultural, dan toleransi.¹⁴ Menguatkan kesimpulan penelitian Ihsan, Ahmad Fatah, Martha Catherine Beck dan Irawan, penelitian Arif Rahman (2015) juga menuturkan pelbagai prinsip dalam rumusan Pancasila terilhami dari Islam. Sementara itu, di sisi lain dalam Islam terdapat ajaran yang memberikan legitimasi atas manifestasi prinsip Pancasila.¹⁵ Selanjutnya, penelitian oleh Musthofa (2017) menyatakan untuk menjadikan pendidikan Islam di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, maka tidak boleh dipisahkan dari muatan nilai-nilai Pancasila.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2018) bahwa terdapat titik temu antara Pendidikan Agama Islam dengan Pendidikan Kewarganegaraan (Pancasila). Hal demikian disebabkan moral Pancasila dominan mengacu pada pelbagai nilai agama.¹⁷ Sejalan dengan Musthofa dan Budiaman, penelitian Matra Jaya (2022) juga menegaskan keberadaan nilai pendidikan Islam dalam rumusan Pancasila dapat ditemukan dalam lima sila yang ada, khususnya sila kesatu, yakni pendidikan akidah.¹⁸ Sedangkan fokus penelitian ini untuk mengungkap keberadaan dimensi pelbagai nilai pendidikan sosial profetik yang termuat pada konstruksi Pancasila melalui perspektif ISP. Hal tersebut yang menjadi aspek perbedaan penelitian ini dari pelbagai penelitaian sebelumnya sebagaimana dipaparkan di atas.

Paradigma Pendidikan Sosial Profetik

Ilmu Sosial Profetik (ISP) merupakan ide penting yang ditawarkan oleh seorang intelektual muslim Indonesia bernama Kuntowijoyo. Melalui ide ISP tersebut ia ingin menunjukkan bahwa ilmu sosial agar jangan sampai berhenti karena merasa puas untuk dalam upaya memahami realitas sosial, melainkan juga penting upaya transformasi nilai dalam kehidupan sosial untuk mewujudkan cita-cita masyarakat ideal. Dalam hal inilah, istilah profetik dalam term ISP memuat kerangka etis yang mengarah pada orientasi kenabian berupa memanusiaikan manusia, membebaskan manusia, dan memngantarkan menuju Tuhan.¹⁹ Hal ini disebabkan eksistensi masyarakat mempunyai karakter profetik dengan

¹³ Ahmad Fatah, "Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java," 2021, 245–46.

¹⁴ DR Martha Catherine Beck and Irawan Irawan, "Islam, Pancasila and Value Systems of Indonesian National Education," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2014): 1.

¹⁵ Arif Rahman, "Paradigma Kritis Pancasila Dalam Dimensi Pendidikan Islam," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015): 141.

¹⁶ Musthofa Musthofa, "Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila," *Jurnal Tarbiyah* 24, no. 1 (2017): 177.

¹⁷ Budiman Budiman, "Hubungan Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Kewarganegaraan," *QATHRUNA* 5, no. 2 (2018): 67.

¹⁸ Matra Jaya, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Butir-Butir Pancasila," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2022): 326.

¹⁹ Irwanto Irwanto, "Pendekatan Ilmu Sosial Profetik Dalam Memahami Makna Ayat-Ayat Al-Qur'an," *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 5, no. 1 (2017): 4–5.

keterlibatan pelbagai unsur terkait erat antara Tuhan, manusia, dan 'sejarah pada konteks perubahan kehidupan sosial.²⁰

Secara eksplisit, sebenarnya Kuntowijoyo tidak menyebut istilah pendidikan sosial profetik. Hanya saja ia mengadopsi istilah profetik yang disandarkan pada ide tentang ilmu sosial yang ditemukannya, sehingga menjadi Ilmu Sosial Profetik (ISP). Ide ISP tersebut diformulasikan dari tiga nilai meliputi nilai humanisasi (*amar makruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (iman). Ketiga nilai ISP ini disandarkan pada pesan ajaran yang termuat dalam landasan teologis Qur'an Surat al-Imron ayat 110.²¹ Kuntowijoyo memandang pesan ajaran dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam ditegaskan menjadi umat terbaik yang memiliki tiga tugas dalam perghumulan kemanusiaan meliputi humanisasi, liberasi, dan transendensi.²² Pada sub bab kerangka teoritik ini, akan diuraikan konstruksi pendidikan sosial profetik. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Nilai Humanisasi

Istilah atau konsep humanisasi merupakan bentuk interpretasi kreatif dari ajaran Islam berupa *amar ma'ruf*, yakni anjuran untuk menegakkan kebenaran. Keberadaan nilai humanisasi ini membawa dimensi dan potensi positif (*ma'ruf*) yang dimiliki manusia. Atas dasar inilah, konsep humanisasi yang diusung Kuntowijoyo memiliki akar pada nilai humanisme-teosentris. Oleh sebab itu, manifestasi nilai humanisasi tidak dapat dilepaskan dari konsep transendensi yang menjadi landasan basis paradigmatiknya.²³

Pernyataan di atas disebabkan dalam paradigma Ilmu Sosial Profetik (ISP), realisasi nilai humanisasi berorientasi pada upaya untuk memanusiaikan manusia, menyelamatkan dari belenggu kebendaan, kekerasan dan kebencian yang dapat terjadei dalam kehidupan sosial manusia itu sendiri. Oleh karena itulah, sesungguhnya nilai humanisasi dalam ide ISP memiliki titik temu dengan nilai atau paradigma dalam konsep liberalisme Barat. Hanya saja terdapat aspek distingsi fundamental, yakni jika keberadaan peradaban Barat berlandaskan pada nilai humanisme antroposentris yang lebih memposisikan kehidupan manusia tidak berpusat pada Tuhan, melainkan dibangun oleh diri manusia sendiri. Hal ini berbeda dengan ide humanisme dalam ide ISP yang digagas Kuntowijoyo, yakni humanisme yang berlandaskan pada nilai humanisme teo-antroposentris. Atas dasar inilah, maka humanisasi dalam ide ISP tidak dapat dipisahkan dari dimensi transendensi yang menjadi landasan falsafahnya.²⁴ Begitu juga secara spesifik pada konteks nilai pendidikan, maka keberadaan nilai humanisasi menjadi landasan dalam mewujudkan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yakni konsep pendidikan yang memposisikan manusia sebagai subjek pendidikan bukan sebaliknya.²⁵

2. Nilai Liberasi

Konsep liberasi dalam ISP disandarkan pada ajaran Islam berupa *nahi munkar*, yakni ajaran yang mencegah tindakan kejahatan. Sementara itu, dalam terminologi ilmu, term

²⁰ Wardani, "Integrasi Ilmu Tafsir dan Ilmu Sosial: Sebuah Catatan Awal Tentang Sosiologi Al-Qur'an," Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 19, no.2 (2020):147.

²¹ Arum, "Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo)," 183.

²² M. Zainal Abidin, *Paradigma Islam Dalam Pembangunan Ilmu Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo* (IAIN Antasari Press, 2016), 219.

²³ Arum, "Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo)," 183-84.

²⁴ Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 164-65.

²⁵ Arum, "Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo)," 183-84.

liberasi dipahami sebagai bentuk pembebasan manusia dari kebodohan, kemiskinan, maupun penindasan.²⁶

Pada ranah praksisnya, keberadaan nilai liberasi dalam ide ISP memuat empat misi yang dibawanya. Pertama, dalam rangka untuk menghindarkan kondisi kehidupan umat manusia dari dampak negatif matrealisme sistem ilmu pengetahuan yang materialistis dan bentuk diskriminasi kelas sosial dan relasi jender. Kedua, dalam rangka untuk menghindarkan kehidupana sosial manusia dari implikasi buruk dunia industri dan sistem sosial yang buruk. Ketiga, dalam rangka untuk memusnahkan sistem ekonomi yang berdampak buruk pada kehidupan sosial manusia. Keempat, dalam rangka untuk menyelamatkan kehidupan sosial politik manusia dari sistem politik yang buruk dan jahat seperti halnya segala bentuk rezim otoriter dan kediktatoran.²⁷ Oleh sebab itulah, dalam konsep pendidikan Islam yang memiliki basis nilai liberasi, maka diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang membebaskan manusia dari pelbagai bentuk belenggu kejahatan, kebodohan, kemiskinan, penindasan, hegemoni dan lain sebagainya.

3. Nilai Transendensi

Keberadaan nilai transendensi dalam ide Ilmu Sosial Profetik merupakan nilai fundamental sekaligus menjadi landasan paradigmatis dari kedua nilai lainnya (humanisasi dan liberasi). Dengan kata lain, nilai transendensi ini tidak dapat dikotomikan dari kedua unsur nilai ISP lainnya. Adapun yang dimaksud dengan istilah transendensi yakni konsep nilai sosial profetik yang diderivasikan dari ajaran Islam berupa perintah keimanan (iman).²⁸

Penting diketahui bahwa keberadaan nilai transendensi dalam ide ISP berperan besar dalam membimbing orientasi hidup individu manusia, khususnya sebagai seorang muslim. Hal demikian disebabkan dalam ranah praksisnya, nilai transendensi akan dapat mengarahkan untuk apa pelbagai bentuk manifestasi nilai humanisasi dan liberasi dilakukan. Atas dasar inilah, nilai transendensi tidak dapat dipisahkan dari nilai humanisasi dan nilai liberasi. Dalam konstruksi ide ISP, ketiganya merupakan nilai integratif bukan dikotomis dikarenakan ketiganya merupakan trilogi nilai sosial profetik yang sinergis dalam pembentukan kepribadian sosial individu manusia.²⁹ Pernyataan demikian paralel dengan sudut pandang psikologi Islam yang menilai eksistensi Islam sebagai ajaran agama yang memuat pelbagai sumber nilai dalam pembentukan kejiwaan sekaligus perilaku manusia yang religius.³⁰

Mengacu pada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa konstruksi pendidikan sosial profetik dibangun di atas tiga nilai sosial profetik berupa nilai humanisasi, nilai liberasi, dan nilai transendensi, baik dalam aspek epistemologis maupun praksis. Ketiga nilai tersebut akan digunakan sebagai teori analisis dalam penelitian ini, yakni untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai pendidikan sosial profetik yang termuat dalam rumusan Pancasila.

Dimensi Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Profetik Dalam Rumusan Pancasila.

Kondisi realitas kemajemukan sosial budaya maupun agama di Indonesia menghendaki pentingnya pengejawantahan paham dan sikap moderat dalam bagi umat

²⁶ Arum, 184–86.

²⁷ M. Muallif and Athoillah Islamy, “Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam Dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 2 (2021): 272.

²⁸ Arum, “Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo),” 184–86.

²⁹ Athoillah Islamy, “Nilai-Nilai Sosial Profetik Dalam Ritualitas Ibadah Puasa Ramadhan,” *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 2, no. 1 (2021): 6–7.

³⁰ Athoillah Islamy, “Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology,” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 38.

beragama di Indonesia, terlebih dalam konteks kehidupan sosial beragama di tengah kehidupan masyarakat. Atas dasar inilah dibutuhkan kesadaran epistemologis umat beragama di Indonesia apapun agamanya agar tidak cenderung membenturkan norma sosial agama dengan norma sosial maupun budaya selama tidak saling bertentangan.³¹ Tidak terkecuali pentingnya pengejawantahan paham maupun sikap umat beragama yang akomodatif kepada pluralitas realitas tradisi lokal di Indonesia.³²

Fakta sebagai negara multikultural sebagaimana di atas membutuhkan kesadaran warga negaranya untuk senantiasa menjaga kerukunan hidup dalam realitas kemajemukan kehidupan sosial maupun budaya.³³ Pada konteks inilah, keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan semangat multikulturalisme bagi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia, tidak terkecuali bagi umat Islam. Namun demikian fakta di lapangan, untuk merealisasikannya tidak mudah. Hal ini dikarenakan masih terdapat sebagian umat Islam di Indonesia yang cenderung resisten terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Fenomena demikianlah yang kemudian menjadi bagian problem nasionalisme di Indonesia yang belum kunjung usai sampai saat ini.³⁴ Fenomena demikian sungguh disayangkan. Mengingat keberadaan Pancasila yang telah menjadi konsesus para pendiri bangsa Indonesia merupakan asas, prinsip maupun pedoman universal dalam kehidupan pluralitas berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengingat karakter pluralitas bangsa Indonesia tidak mengherankan jika keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara tidak identik dengan simbol-simbol kelompok tertentu.³⁵

Sebelum jauh memahami dimensi nilai-nilai pendidikan sosial profetik dalam rumusan Pancasila, penting kita pahami terlebih dahulu apa arti istilah Pancasila. Secara bahasa, term “Pancasila” terbentuk dari dua kata, yakni kata Panca yang berarti lima, dan kata Sila yang berarti dasar. Berdasarkan unsur etimologis ini, maka kata Pancasila mengandung arti lima dasar, yakni lima dasar ideologi negara Indonesia.³⁶ Oleh sebab itu, konstruksi nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral disebabkan masing-masing sila Pancasila saling sinergis dan kontributif dalam merealisasikan cita-cita kolektif yang diusungnya.³⁷ Atas dasar inilah, tidaklah mengherankan bahwa pelbagai nilai universal yang termuat dalam Pancasila dapat bertransformasi dalam pembentukan peradaban masyarakat Indonesia, terlebih dalam konteks sebagai nilai pembentukan atau pendidikan karakter bangsa.³⁸ Pada sub bab pembahasan ini, akan dipaparkan dimensi nilai-nilai pendidikan sosial profetik yang termuat pada pelbagai sila Pancasila, sebagai berikut.

1. Nilai Pendidikan Transendensi dalam Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*

³¹ Ahmad Syarif Makatita, Athoillah Islamy, “Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua : Integrasi Syariat Islam dan Budaya dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani,” *Jurnal At-Taghyir* Vol.4, no.2 (2022):242

³² Husaini, Athoillah Islamy, “Harmonization of Religion and State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation,” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 7 No. 1, Januari 2022: 52

³³ Athoillah Islamy, “Pendidikan Islam Multikultural dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia,” *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC)*, vol.5, no.1 (2022): 51.

³⁴ Mokhammad Zainal Anwar, Yuyun Sunesti, and Islah Gusmian, “Pro Dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim Di Solo,” *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021): 107.

³⁵ M. K. Ridwan, “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi,” *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (2017): 209.

³⁶ M. Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi* (Banjarmasin: Aswaja Presindo, 2015), 8.

³⁷ Irwan Gesmi and Yun Hendri, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 6.

³⁸ Veronica Eka Desi Natalia, Anisa OS Pratama, and Margareta Dewi Astuti, “Implementation of Pancasila Values in Character Education: A Literature Review,” *International Journal Pedagogy of Social Studies* 6, no. 1 (2021): 35.

Secara eksplisit, keberadaan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa,” telah menunjukkan kepada kita, bahwa Indonesia merupakan negara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai ajaran agama (ketuhanan) dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Muatan nilai dalam sila pertama tersebut juga menegaskan bahwa kendatipun bukan negara teokrasi, Indonesia juga bukanlah negara sekuler yang memisahkan ajaran agama dari kehidupan bernegara. Hal Pernyataan demikian terbukti secara empiris, bahwa pluralitas agama yang tumbuh di Indonesia sebagai negara demokrasi mendapatkan bentuk advokasi dan jaminan perlindungan dari negara.³⁹ Tidak hanya itu, keberadaan sila pertama ini juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia merealisasikan pelbagai bentuk kewajiban dan menghindari larangan agamanya.⁴⁰ Pada konteks inilah, kesadaran pentingnya pengejawantahan sikap toleransi (tasamuh) oleh umat Islam sangat dibutuhkan, terlebih dalam merespons pluralitas ekspresi keberagaman umat beragama dalam kehidupan sosial di Indonesia.⁴¹ Terlebih dalam konteks Indonesia, perwujudan nilai toleransi menjadi elemen yang sangat urgen dalam membangun keharmonisan hidup di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Wujud simbol pluralisme agama tersebut juga berupa menghindari klaim minoritas terhadap individu (kelompok) penganut agama dengan jumlah pengikut sedikit, dan sebaliknya klaim mayoritas bagi kelompok yang pengikutnya terbanyak.⁴²

Jika dilihat dalam perspektif pendidikan sosial profetik, maka keberadaan nilai ketuhanan yang termuat dalam sila pertama Pancasila dapat menjadi basis nilai, paradigma maupun pendekatan dalam mentransformasikan nilai-nilai transendensi pada segala bentuk aktifitas pendidikan. Hal demikian disebabkan aktifitas pendidikan bukanlah sekedar aktifitas formal, melainkan seyogyanya memuat proses internalisasi nilai-nilai transendensi dari ajaran agama di dalamnya. Nilai pendidikan transendensi demikian dalam ranah praksisnya akan dapat membangun kesadaran sekaligus kreativitas peserta didik untuk dapat memperluas cakupan makna dari pelbagai bentuk praktek keberagaman yang diajarkan.⁴³

Perlu disadari bahwa pentingnya internalisasi nilai keimanan (transendensi) dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia bukanlah kepentingan Islam secara primordial, melainkan sudah menjadi bagian dari kesadaran nasional tentang urgensi membumikan nilai fungsional keimanan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan secara eksplisit, Garis Besar Haluan Negara tahun 1993 telah menegaskan bahwa eksistensi pendidikan nasional memiliki orientasi untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, yaitu salah satu karakternya yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada konteks inilah, sistem pendidikan Islam menjadi bagian sistem pendidikan nasional yang sangat diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai transendensi dalam aktifitas pendidikan di Indonesia.

Keberadaan muatan nilai pendidikan transendensi dalam sila pertama Pancasila juga menegaskan bahwa aspek transendensi sebagai landasan pendidikan Islam di Indonesia telah mendapat legitimasi konstitusional dari negara. Maka dari itu, tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa muatan nilai ketuhanan pada sila Pertama dapat menjadi basis nilai atau paradigma transformasi nilai-nilai transendensi dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia,⁴⁴ meski notabene bukan sebagai negara teokrasi.

³⁹ Mirwan Fikri Muhkam and Sukri Badaruddin, “Religious Pluralism in the Framework of Pancasila Ideology,” *Al-Bayyinah* 5, no. 2 (2021): 130.

⁴⁰ Nurva Miliano and Dinie Anggraeni Dewi, “Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia,” *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 1, no. 4 (2021): 4.

⁴¹ Ali Ahmad Yenuri et al., “Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia: (Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq),” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2021): 141.

⁴² Athoillah Islamy, “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,” (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 217.

⁴³ Hadi Purnomo, *Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Absolute Media, 2010), 82–83.

⁴⁴ Purnomo, 59–61.

2. Nilai Pendidikan Humanis dalam Sila Kemanusiaan dan Sila Persatuan

Fakta empirik menunjukkan bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia tercermin dalam pelbagai macam suku, ras, adat, kearifan lokal, agama, dan lain sebagainya. Untuk menjaga seklaigus merwata keharmonisan dalam kemajemukan tersebut dibutuhkan manifestasi nilai karakter sosial umat beragama di Indonesia yang baik, dan budi pekerti luhur.⁴⁵ Dalam hal ini, keberadaan sila kedua Pancasila yang berbunyi *Kemanusiaan Yang Beradab* mengingatkan kita kembali bahwa manusia secara kodrati menempati posisi setara di hadapan Tuhan (Allah). Atas dasar inilah, paham dan sikap sosial keberagamaan dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia harus mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara beradab.⁴⁶ Muatan nilai kemanusiaan (humanisme) dalam sila kedua tersebut pada ranah praksis kehidupan masyarakat Indonesia juga dapat menjadi landasan paradigma sekaligus nilai dalam pembentukan karakter kepribadian yang memiliki paham dan sikap bahwa selain keberadaan nilai keagamaan juga ada keberadaan nilai kemanusiaan yang penting dihormati dan dihargai dalam interaksi kehidupan sosial.

Sementara itu, Sila ketiga yang berbunyi "*Persatuan Indonesia*" menyadarkan masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kemajemukan bangsa Indonesia. Sila persatuan Indonesia ini mengesakan bahwa dalam merealisasikan kemaslahatan kehidupan bernegara di Indonesia harus dapat mengedepankan kepentingan bersama dalam menjaga persatuan bangsa dan negara.⁴⁷ Muatan nilai persatuan yang termuat dalam sila persatuan diharapkan dapat mewujudkan kesadaran masyarakat Indonesia agar dapat saling bersatu. Hal demikian disebabkan dengan paham dan sikap sosial yang menjunjung tinggi terwujudnya persatuan, maka dapat menghindarkan disintegrasi sosial dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada konteks inilah, pentingnya semangat nasionalisme merupakan keniscayaan yang sangat penting dan dibutuhkan, terlebih pada konteks kemajemukan latar belakang sosial masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak lain demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan bernegara di Indonesia yang plural.⁴⁸

Muatan nilai dalam sila kemanusiaan dan persatuan di atas paralel dengan nilai pendidikan humanis. Pernyataan ini didasarkan pada semangat nilai humanisasi sendiri pada konteks pendidikan menjadi komitmen dalam mewujudkan terciptanya komitmen bersama atas rasa kemanusiaan antara sesama. Oleh sebab itu, nilai pendidikan humanis memiliki orientasi pemberdayaan manusia melalui ilmu pengetahuan. Maksudnya, yakni konsep humanisasi memiliki orientasi pemberdayaan yang manusia melalui penyadaran atas urgensinya ilmu pengetahuan dan juga menududukan manusia sebagaimana mesti manusia dengan segala potensi yang dimilikinya. Humanisasi dalam konteks pendidikan ini akan mendudukan manusia sesuai dengan fitrahnya, yakni keberadaan manusia bukan menjadi budak manusia lainnya atau adanya relasi objek menjadi subjek. Dengan demikian akan terwujud aktifitas pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Manifestasi nilai kemanusiaan dan persatuan Pancasila sebagai nilai pendidikan humanis dalam ranah praksisnya tidak terlepas dari asas kemerdekaan dan tanggung jawab sosial. Kedua asas tersebut menjadi fundamental dalam merealisasikan aktifitas pendidikan humanis, yakni dapat mengantarkan aktifitas pendidikan yang menekankan pada prinsip persamaan derajat sesama manusia. Persamaan derajat dalam konteks pendidikan humanis sangat urgen dalam rangka memberikan hak kemerdekaan individu sebagai manusia dengan

⁴⁵ Sholikah, "Kontribusi dan Peluang Pendidikan Islam pada Era Disrupsi (Analisis Kritis terhadap Sistem Pendidikan Karakter di Indonesia)," *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 12, No. 1(2022): 52

⁴⁶ Miliano and Dewi, "Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia," 4.

⁴⁷ Amalia Rizki Wandani and Dinie Anggraeni Dewi, "Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2021): 36.

⁴⁸ Miliano and Dewi, "Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia," 4.

seagala potensi akademiknya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, asas tanggung jawab sosial tersebut akan menyadarkan masing-masing individu manusia memiliki akuntabilitas dalam kehidupan interaksi sosialnya. Atas dasar inilah, manifestasi nilai sila kemanusiaan dan persatuan dalam konsep pendidikan humanis tidak dapat dilepaskan dari pengejawantahan asas kemerdekaan individu dan tanggung sosial.⁴⁹

3. Nilai Pendidikan Liberasi dalam sila Demokrasi dan Keadilan Sosial

Keberadaan sila Pancasila yang menekankan sikap demokrasi (musyawarah) dalam kehidupan sosial bermasyarakat maupun bernegara. Pesan demikian secara eksplisit dapat kita temukan pada sila keempat yang berbunyi *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan*. Sila tersebut menekankan seluruh elemen masyarakat Indonesia agar dalam hal keputusan atas persoalan bersama, baik terkait kemasyarakatan maupun kenegaraan hendaknya senantiasa melalui cara bermusyawarah.⁵⁰

Sementara itu, sila kelima Pancasila yang berbunyi *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* menegaskan kepada kita bahwa negara menjamin akses atas memperoleh kemaslahatan dan kesejahteraan sesuai haknya masing-masing bagi seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial yang termuat dalam sila kelima tersebut pada ranah praksisnya diharapkan dapat membentuk paham dan sikap sosial masyarakat Indonesia agar mau menghormati dan menghargai pelbagai hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengekspresikannya.

Muatan nilai demokrasi dan keadilan sosial di atas sejalan dengan nilai pendidikan liberasi. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan, dikarenakan nilai liberasi sendiri dalam paradigma Ilmu Sosial Profetik memiliki arti pembebasan. Sementara itu, dalam konteks pendidikan liberasi akan mengarahkan pada upaya proses pembimbingan individu agar dapat terbebas dari intervensi pihak atau kelompok apapun yang berdampak negatif dalam kehidupan. Hal demikian disebabkan adanya kesadaran dalam nilai pendidikan liberasi bahwa seluruh manusia mengharapkan adanya bentuk kebebasan yang bertanggung jawab dalam ralitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam konteks pendidikan.

Tidak berhenti di atas, dimensi nilai pendidikan liberasi dalam sila demokrasi dan keadilan sosial juga akan menekankan kesadaran bahwa setiap manusia sejatinya memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pilihannya sesuai dengan yang diinginkannya. Akan tetapi, manusia memiliki tanggungjawab, baik secara personal maupun sosial terkait apa yang menjadi pilihannya. Pada konteks inilah, muatan nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam konteks nilai pendidikan sosial profetik akan mengantarkan individu pada upaya kesadaran ketidak tahuannya dan melepaskannya dari belenggu struktur sosial yang ada. Hal demikian tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik Untuk mencapai tujuan tersebut, yakni harus membebaskan individu dari ketidaktahuan menjadi manusia untuk berpengetahuan. Di mana peningkatan kualitas tersebut dapat dilakukan secara optimal melalui proses dalam pendidikan.⁵¹

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai pendidikan sosial profetik yang termuat pada konstruksi Pancasila. Kesimpulan besar demikian dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut. Pertama, nilai pendidikan transendensi dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Keberadaan nilai ketuhanan yang termuat dalam sila pertama Pancasila dapat menjadi basis nilai, paradigma maupun pendekatan dalam

⁴⁹ Purnomo, *Pendidikan Islam*, 59–61.

⁵⁰ Wandani and Dewi, "Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat," 36.

⁵¹ Purnomo, *Pendidikan Islam*, 66–71.

mentransformasikan nilai-nilai transendensi pada segala bentuk aktifitas pendidikan. Kedua, nilai pendidikan humanis dalam sila kemanusiaan dan sila persatuan. Keberadaan nilai kemanusiaan dan persatuan yang termuat dalam sila kedua dan ketiga Pancasila dapat menjadi basin nilai, paradigma maupun pendekatan aktifitas pendidikan humanis yang memiliki orientasi pemberdayaan manusia atas urgensi ilmu pengetahuan sekaligus menududukkan manusia sebagaimana mesti manusia dengan segala potensi yang dimilikinya. Ketiga, nilai pendidikan liberasi dalam sila demokrasi dan keadilan sosial. Keberadaan nilai ketuhanan yang termuat dalam sila pertama Pancasila dapat menjadi basis nilai, paradigma maupun pendekatan dalam pendidikan liberasi yang memiliki orientasi untuk membimbing individu agar dapat terbebas dari intervensi pihak atau kelompok apapun yang berdampak negatif dalam kehidupan sosialnya.

Implikasi teoritik dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat titik temu muatan nilai universal dalam Pancasila dengan ajaran sosial keberagamaan Islam. Oleh sebab itu, tidak perlu membenturkan keduanya, terlebih dalam konteks kemajemukan hidup umat manusia di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini sekaligus dapat menjadi lacuna (celah) untuk penelitian berikutnya, yakni penelitian ini belum mengkaji bagaimana bentuk peran pemerintah dalam mendesiminasikan titik temu pelbagai nilai sosial keberagamaan Islam yang termuat dalam konstruksi Pancasila pada kehidupan praksis masyarakat Indonesia, khususnya dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Hal ini penting untuk dikaji, karena masih terdapat paradigma dikotomis bahkan konfrontatif pada sebagian umat Islam di Indonesia dalam memandang relasi Islam dan Pancasila.

Daftar Rujukan

- Abidin, M. Zainal. *Paradigma Islam Dalam Pembangunan Ilmu Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo*. IAIN Antasari Press, 2016.
- Amirullah, Amirullah, Athoillah Islamy, and Hamzah Hamzah. "Moderasi Fikih Muamalah Di Indonesia: Analisis Terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional." *Al-Bayyinah* 6, no. 1 (2022): 95–108.
- Anwar, Mokhammad Zainal, Yuyun Sunesti, and Islah Gusmian. "Pro Dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim Di Solo." *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021): 107–27.
- Arum, Khusni. "Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo)." *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2018, 177–96.
- Beck, DR Martha Catherine, and Irawan Irawan. "Islam, Pancasila and Value Systems of Indonesian National Education." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2014): 1–23.
- Budi Sulistiyo Nugroho, Minnah El Widdah, Lukman Hakim, Muh. Nashirudin, Acep Nurlaeli, Joko Hadi Purnomo, Muhammad Aziz, Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Muhammad Khoirul Fikri, Abdul Mufid, Agus Purwanto, Mochammad Fahlevi, Effect of Organizational Citizenship Behavior, Work Satisfaction and Organizational Commitment Toward Indonesian School Performance (2020). *Sys Rev Pharm* 2020;11(9):962-971, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3986863>.
- Budiman, Budiman. "Hubungan Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Kewarganegaraan." *QATHRUNÂ* 5, no. 2 (2018): 67–80.
- Fatah, Ahmad. "Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java," 2021.
- Gesmi, Irwan, and Yun Hendri. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Hidayati, Nunung, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy. "Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia." *Transformasi* 3, no. 2 (2021): 1–17.

- Husaini, H., & Islamy, A. "Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no.1(2022)48–74.
- Irwanto, Irwanto. "Pendekatan Ilmu Sosial Profetik Dalam Memahami Makna Ayat-Ayat Al-Qur'an." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 5, no. 1 (2017): 1–12.
- Islamy, Athoillah. "Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 35–46.
- . *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid [Disertasi]*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo (2021), 217.
- . "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- . "Nilai-Nilai Sosial Profetik Dalam Ritualitas Ibadah Puasa Ramadhan." *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 2, no. 1 (2021): 1–15.
- . Pendidikan Islam Multikultural dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 5 no.1 (2022): 48–61.
- . "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 155–79.
- Jaya, Matra. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Butir-Butir Pancasila." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2022): 316–29.
- Kaderi, M. Alwi. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Aswaja Presindo, 2015.
- Makatita, A. S., & Islamy, A. "Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua: Integrasi Syariat Islam dan Budaya dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 4 no.2(2022): 242.
- Maskur, Maskur. "Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah Atas Relasi Humanisasi, Liberasi Dan Transendensi)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.
- Miliano, Nurva, and Dinie Anggraeni Dewi. "Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia." *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 1, no. 4 (2021).
- Mualif, M., and Athoillah Islamy. "Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam Dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 2 (2021): 267–78.
- Muhkam, Mirwan Fikri, and Sukri Badaruddin. "Religious Pluralism in the Framework of Pancasila Ideology." *Al-Bayyinah* 5, no. 2 (2021): 129–41.
- Musthofa, Musthofa. "Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila." *Jurnal Tarbiyah* 24, no. 1 (2017).
- Natalia, Veronica Eka Desi, Anisa OS Pratama, and Margareta Dewi Astuti. "Implementation of Pancasila Values in Character Education: A Literature Review." *International Journal Pedagogy of Social Studies* 6, no. 1 (2021): 35–42.
- Purnomo, Hadi. *Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Absolute Media, 2010.
- Rahman, Arif. "Paradigma Kritis Pancasila Dalam Dimensi Pendidikan Islam." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015).
- Ridwan, M. K. "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi." *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (2017): 199–220.
- Rohman, M. Saifullah. "Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila." *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2013, 205–16.

- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 198–217.
- . "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 19–40.
- Sholikah, "Kontribusi dan Peluang Pendidikan Islam pada Era Disrupsi (Analisis Kritis terhadap Sistem Pendidikan Karakter di Indonesia)," *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1(2022): 52
- Sutomo, Imam, and Budihardjo Budihardjo. "The Rejection of Religious Nationalism Towards The Secular State And The Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (2021): 115–37.
- Syam, Nur, and S. Maryam Yusuf. "Islam Dan Pancasila Dalam Pertarungan Ideologi Dunia: Perspektif Sosiologis." *Dialogia, Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 18 (2020).
- Wandani, Amalia Rizki, and Dinie Anggraeni Dewi. "Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2021): 34–39.
- Wardani, "Integrasi Ilmu Tafsir dan Ilmu Sosial: Sebuah Catatan Awal Tentang Sosiologi Al-Qur`an," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 19, no.2 (2020):147.
- Yenuri, Ali Ahmad, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, and Rachmad Surya Muhandy. "Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq)." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2021): 141–56.